



INSTITUTE FOR STRATEGIC AND DEVELOPMENT STUDIES
OFFICE :

SIARAN PERS

INSTITUTE FOR STRATEGIC AND DEVELOPMENT STUDIES

(ISDS)

**Hasil Polling ISDS Di 6 Ibukota Provinsi Di Pulau Jawa
AKUNTABILITAS LEMBAGA PEMBERANTASAN KORUPSI
“Persepsi Masyarakat Terhadap “Konflik” Kepolisian Vs KPK”**

**Hasil Polling By Phone ISDS Di 6 Ibukota Provinsi Di Pulau Jawa
AKUNTABILITAS LEMBAGA PEMBERANTASAN KORUPSI
“Persepsi Masyarakat Terhadap “Konflik” Kepolisian Vs KPK”**

Latar Belakang

Ada hal yang menarik dari publikasi trend korupsi yang terjadi di Indonesia pada Semester I (Januari – Juni) tahun 2007, yang dilakukan Indonesian Corruption Watch (ICW), lembaga swadaya masyarakat yang menjadi corong publik dalam menyuarakan gema anti korupsi. Ditemukan 51 kasus korupsi baru yang terungkap dengan potensi kerugian negara mencapai Rp. 665, 8 miliar. Jumlah kasus baru ini masih teramat sedikit jika dibandingkan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai kerugian negara. Sebagai perbandingan, dalam hasil pemeriksaan sementara Semester II (Juli – Desember) tahun 2006 dilaporkan terjadi 5.776 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp. 13,3 triliun. Masih besarnya data tingkat korupsi di Indonesia barangkali menyebabkan Peringkat Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada 2008 menduduki peringkat 126 dari 180 negara atau di atas negara Philipina, Laos, Kamboja dan Myanmar.

Masih besarnya persoalan korupsi di Indonesia tersebut, mungkin agak mengherankan karena upaya pemberantasan korupsi di Indonesia telah lama menjadi retorika pejabat negeri ini bahkan pada tahun 1970-an ketika Orde-Baru berkuasa. Apalagi di setelah era reformasi 1998 yang jauh lebih nyaring menyuarakan anti korupsi dan good governance. Mengapa kemudian kuatnya gema anti korupsi tak banyak menyurutkan angka korupsi di Indonesia? Banyak hal yang bisa menjelaskan antara lain: Lemahnya system pengawasan Korupsi di Indonesia, Masih terciptanya celah dalam regulasi pengawasan keuangan negara termasuk masalah tender pengadaan barang dan jasa, masalah mental atau korupsi yang sudah mebudaya di birokrasi dan sebagainya. Oleh karena itu, ketika lembaga pemberantasan korupsi KPK dibentuk banyak harapan muncul di masyarakat akan ada terobosan besar pemberantasan korupsi di Indonesia. Walaupun sempat membuat gebrakan pada awalnya, tapi belakangan citra KPK disorot public karena dianggap terbang pilih dan dianggap terjebak “conflict interest dengan stake holders pemberantasan korupsi seperti Kepolisian. Eksistensi dua lembaga tersebut sangatlah penting dan tidak bisa dipisahkan dalam kerangka penegakan hukum (oleh kepolisian) dan pemberantasan korupsi yang dimotori oleh KPK. Karena dua institusi ini sesungguhnya saling melengkapi dan diperlukan dalam rangka penegakan supremasi hukum di negeri ini.

Memang terkesan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga “superbody”, dengan kewenangan yang dimilikinya cenderung meng-*handle* semua bidang garapan, mulai dari pencegahan, penyelidikan, penyidikan sampai penahanan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan pengalaman perselisihan KPK dengan Kepolisian sekarang ini dan ditengah menguatnya resentralisasi kekuasaan legislative dan eksekutif pasca Pemilu 2009, dari temuan INSTITUTE FOR STRATEGIC AND DEVELOPMENT STUDIES (ISDS) data polling persepsi public terhadap akuntabilitas lembaga pemberantasan Korupsi dalam perselisihan kepolisian ini adalah: Agar strategi pembaruan di bidang penegakan hukum itu harus mengikutsertakan seluruh rantai penegakan hukum. Kebijakan keseluruhan bagi sektor ini dan strategi pembaruan bagi kepolisian dan kejaksaan harus dikembangkan dengan partisipasi pihak yang berkepentingan, khususnya masyarakat luas terutama menguatkan control media massa terhadap pengungkapan kasus-kasus korupsi.

Polling merupakan salah satu cara menjangring pendapat atau persepsi ataupun penilaian masyarakat secara scientific (berdasarkan kaidah-kaidah statistik) yang bisa dilakukan dengan metode by phone ataupun lapangan (face to face). Polling survei ini berguna untuk mengukur arah aspirasi masyarakat dalam masalah reslasi KPK dan Kepolisian, dan juga bisa menjadi tolok ukur menilai kebijakan pemerintah, dan apa pendapat (opini) serta harapan mereka terhadap pejabat/politisi maupun institusi yang ada terkait stake holder pemberantasan korupsi di Indonesia. Polling Survei opini publik ini diharapkan bisa membantu mendekatkan keputusan-keputusan publik dengan aspirasi publik, dan elit mengetahui keputusan-keputusan yang kurang populer tapi harus dibuat sehingga perlu dijelaskan kepada publik secara luas. Dengan demikian, pemerintahan hasil pemilu ini bisa semakin legitimate, bertanggungjawab, dan efektif. Dengan cara itu pula polling survei opini publik menjadi 'barometer' aspirasi masyarakat;

Bagaimana sikap masyarakat umum mencermati hangatya pembicaraan mengenai dua petinggi lembaga tersebut? ISDS, sebuah lembaga riset dan kajian kebijakan publik telah melakukan penelitian survai lewat telepon (*polling by phone*) terhadap masyarakat pemilik telepon, khususnya di ibukota provinsi di Pulau Jawa, terhitung tanggal 6 Oktober – 12 Oktober 2009.

Tujuan

Survai by phone (Polling) ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang pendapat, saran dan harapan masyarakat pemilik telepon terhadap isu konflik Polisi Vs KPK. Secara khusus polling ini bertujuan untuk:

- 2.1. Memperoleh data & informasi yang akurat mengenai persepsi maupun penilaian masyarakat umum pemilik telepon rumah yang ada di 6 ibukota provinsi di Jawa
- 2.2. Memperoleh gambaran, seberapa besar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap 2 institusi penegak hukum ini [Kepolisian & KPK] setelah terjadinya konflik.
- 2.3. Memperoleh gambaran mengenai persepsi ataupun penilaian masyarakat terhadap statement tokoh-tokoh politik, pejabat negara, aktivis LSM terkait masalah kepolisian dan KPK.

METODA DAN DEMOGRAFI RESPONDEN

Metoda Polling

1. Sampling Wilayah

Survai By Phone (Polling) ini akan dilakukan terhadap masyarakat umum pemilik telepon rumah yang ada di 6 ibu kota provinsi di Jawa, yakni Kota Bandung, Kota Serang,

DKI Jakarta, Kota Semarang, Kota Yogyakarta dan Kota Surabaya. Sumber acuan utama pemilihan nomor telepon responden adalah Buku Petunjuk Telepon Residensial terbitan PT. Telkom.

2. Penarikan Sampel Responden

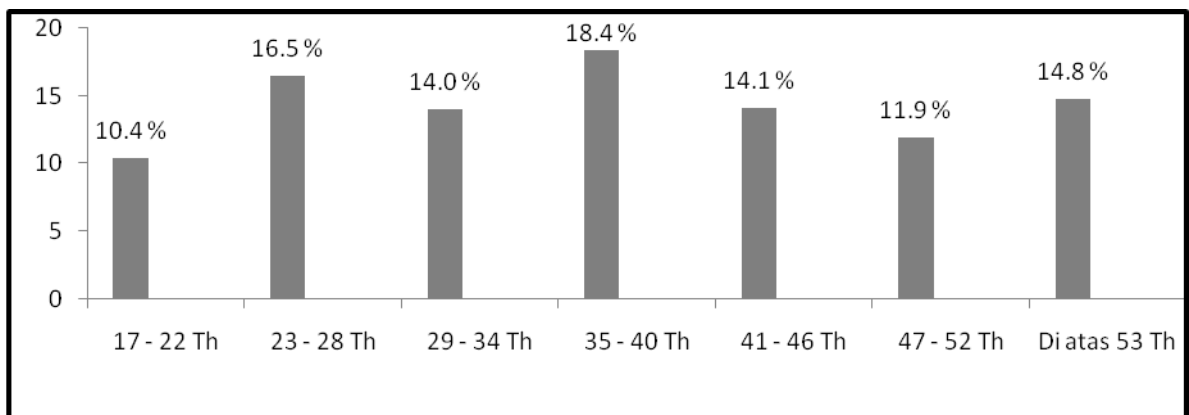
Sampel responden survai by phone (polling) ini akan diambil berdasarkan Buku Petunjuk Telepon Residensial yang dikeluarkan PT. Telekomunikasi Indonesia yang ada di masing-masing ibu kota provinsi. Responden yang akan diwawancarai untuk setiap ibukota provinsi adalah salah seorang anggota keluarga / rumah tangga pemilik telepon terpilih yang telah berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah dengan pendidikan minimal SLTA atau sederajat. Sementara itu, responden terpilih untuk diwawancarai dalam setiap rumah dipilih secara acak sistematis berdasarkan Buku Petunjuk Telepon Residensial..

Dengan proses pengambilan sampel seperti tersebut di atas, survai ini di-*design* memiliki kesalahan sampling (*sampling error/ SE*) sebesar $\pm 3.4 \%$ pada tingkat kepercayaan 95%. **Distribusi Sampel Responden**

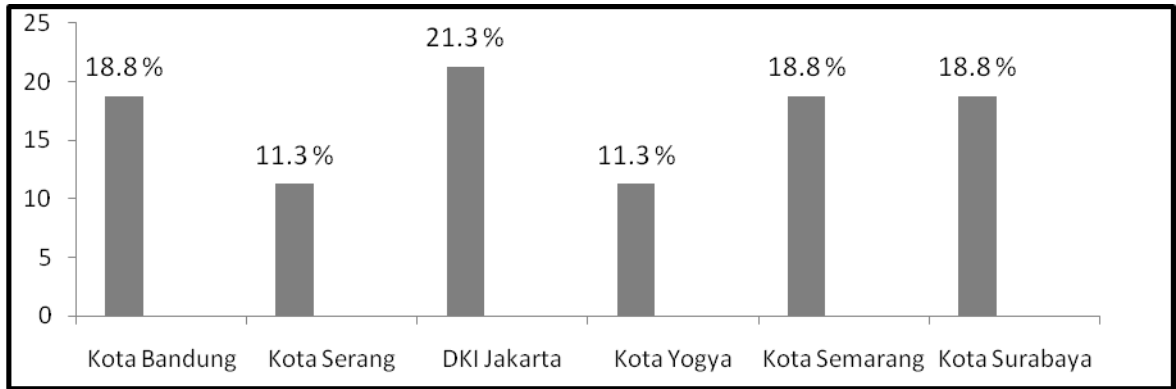
No	Nama Ibu Kota Provinsi	Jumlah Sampel Responden
1	Kota Bandung	150
2	Kota Serang	90
3	DKI Jakarta	170
4	Kota Yogyakarta	90
5	Kota Semarang	150
6	Kota Surabaya	150
	Jumlah Total Responden	800

Demografi Responden

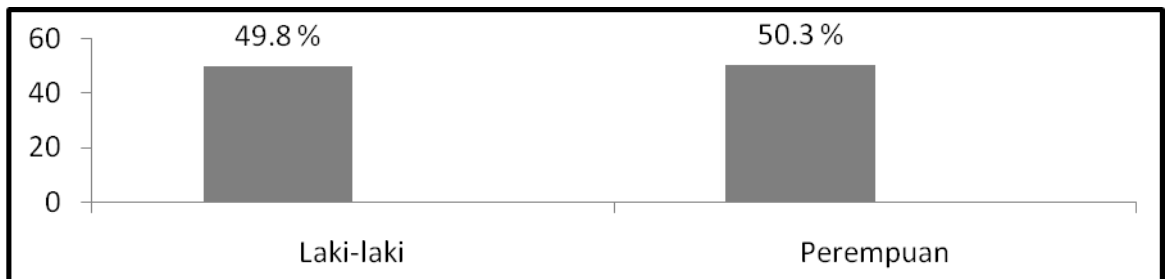
A. Usia Responden (sampel [n] = 800)



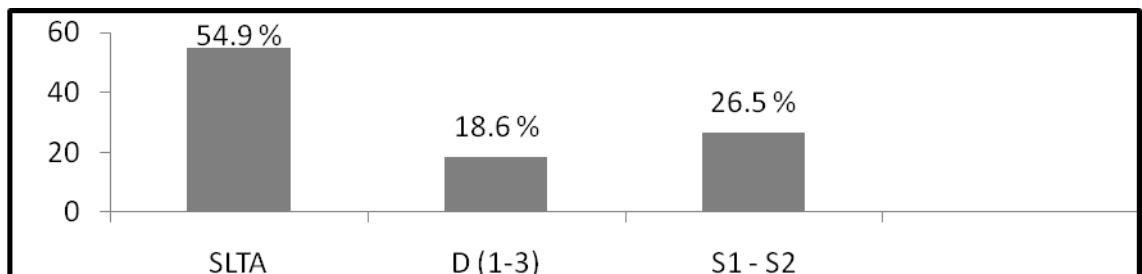
B. Kota Domisili Responden (n = 800)



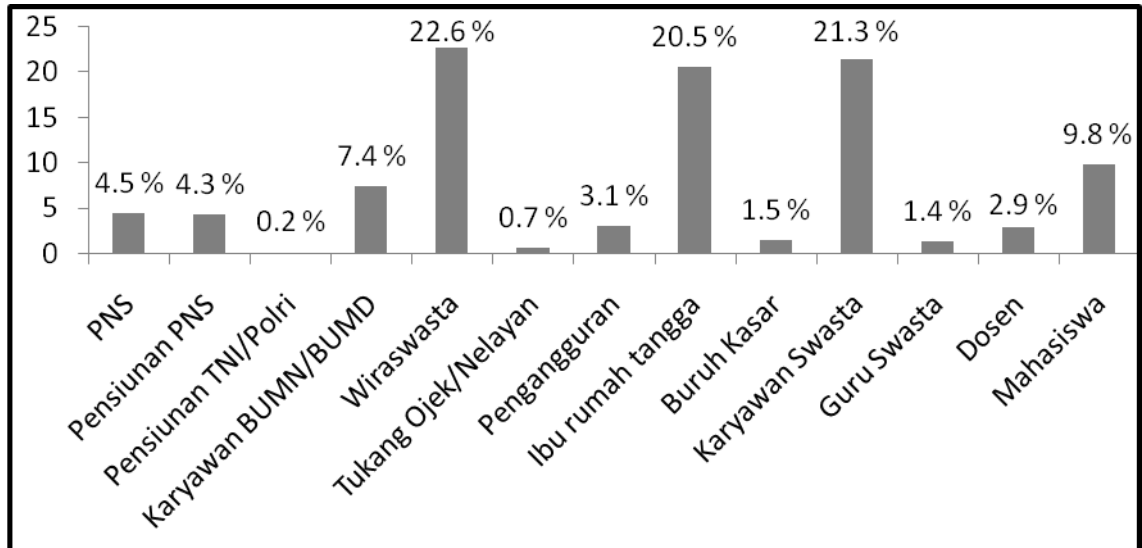
C. Jenis Kelamin Responden (n = 800)



D. Jenjang Pendidikan Responden (n = 800)



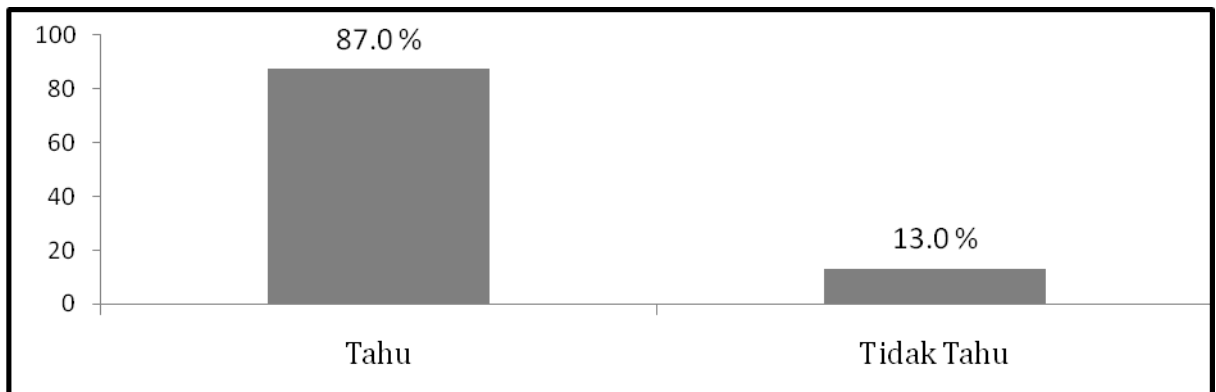
E. Jenis Pekerjaan Responden (n = 800)



Eksplorasi Pertanyaan

1. Tingkat Pengetahuan Masyarakat Mengenai Perseteruan Polisi Vs KPK

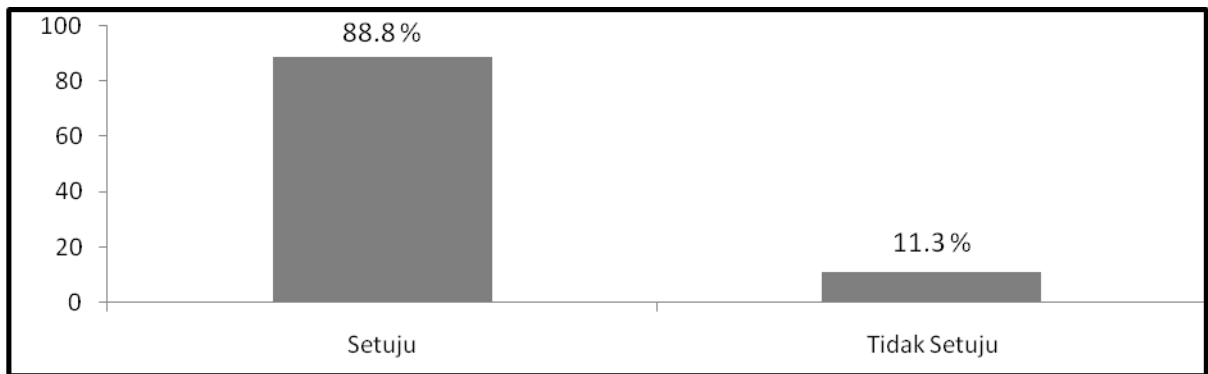
Pertanyaan : Apakah bapak/ibu/saudara *tahu* atau *tidak tahu* bahwa saat ini tengah terjadi perseteruan antara Kepolisian dengan KPK? n = 800



Seperti terlihat pada diagram batang di atas, lebih dari tiga perempat masyarakat (87.0 %) masyarakat pemilik telepon rumah di 6 kota besar mengaku “tahu” soal konflik yang terjadi antara kepolisian dengan KPK terkait penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang melibatkan para petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK]. Sementara itu sisanya (13.0 %) mengaku “tidak mengetahui” secara detail kasus yang sedang menimpa para petinggi KPK tersebut. Hal ini disebabkan mereka lebih sibuk dengan rutinitas sehari-hari dalam upaya memperbaiki taraf hidup ekonomi keluarga, disamping alasan tidak mengerti soal hukum maupun politik dan takut salah menjawab. Persentase pengetahuan masyarakat yang cukup signifikan ini (87.0 %) mengenai perseteruan ini sebenarnya tidak mengejutkan mengingat dua lembaga aparat penegak hukum dan korupsi ini, akhir-akhir ini sedang memperoleh sorotan positif. Institusi kepolisian sedang hangat dibicarakan kerana prestasinya yang telah berhasil menumpas 2 gembong teroris, yang paling dicari yakni DR. Azahari (*yang telah lebih dahulu tertembak mati*) dan Noordin M Top yang tertembak beberapa hari lalu. Sementara itu KPK, terutama ketika masa kepemimpinan Taufiqurrahman Ruki dan pada saat awal-awal kepemimpinan Antasari Azhar, sangat disanjung dan diacungi jempol oleh masyarakat karena, “kabarnya” telah berhasil menyelamatkan uang negara dari para koruptor sampai trilyunan rupiah. Keberhasilan KPK tersebut kini terkontaminasi dengan munculnya kasus pembunuhan terhadap direktur PT. Rajawali Banjaran yang justru melibatkan orang nomor satu (1) di KPK. Potret suram pemberantasan korupsi dan kolusi (suap) di Indonesia diperparah dengan dugaan suap yang disangkakan kepada 2 orang petinggi KPK lainnya. Sungguh ironis memang, tetapi hukum harus tetap ditegakkan, siapapun yang terlibat harus diproses secara hukum, demi rasa keadilan ditengah tengah masyarakat yang selalu mendambakan dan merindukan bahwa suatu saat hukum harus menjadi tuan yang adil dan bijak di negerinya sendiri.

2. Tingkat Persetujuan Masyarakat Terhadap Proses Penegakan Hukum Tanpa Pandangbulu

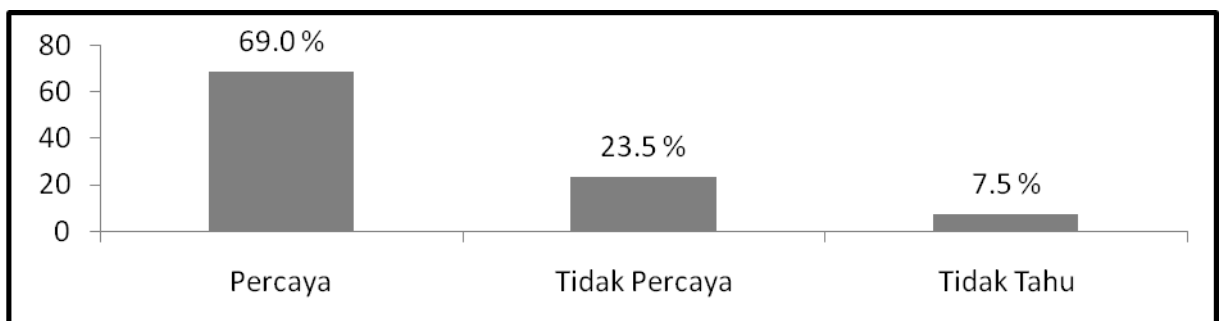
Pertanyaan: Apakah bapak/ibu/saudara *setuju* atau *tidak setuju* dengan pernyataan bahwa semua orang, *termasuk pejabat negara*, harus diperlakukan sama di depan hukum? n = 800



Terlihat pada diagram di atas, lebih dari tiga perempat masyarakat (88.8 %) setuju bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandangbulu, artinya siapapun yang terlibat kasus hukum (kriminal maupun korupsi),-*termasuk pejabat negara sekalipun*,- harus diproses secara hukum, hanya 11.3 % yang “tidak setuju” hukum harus diperlakukan sama (tanpa pandangbulu). Jika melihat persentase jawaban yang “setuju” (88.8 %), dan menjawab “tahu” (87.0 %) dalam pertanyaan pertama tadi, ada tambahan sebanyak 1.8 % (88.8 % - 87.0 %) masyarakat yang setuju dengan penegakan hukum tanpa pandangbulu. Di sisi lain, ada sekitar 11.3 % masyarakat yang “tidak setuju” hukum harus ditegakkan tanpa pandangbulu. Hal ini patut kita hargai karena mereka mengaku benar-benar tidak mengerti dengan persoalan hukum, sibuk dengan urusan ekonomi keluarga dan takut salah menjawab. Berdasarkan data ini, bagi pihak kepolisian atau penegak hukum lainnya (kejaksaan, pengadilan) menjadi satu dorongan atau pemicu dalam rangka menegakkan hukum di Indonesia, jangan takut menegakkan hukum karena sebanyak (88.8 %) masyarakat mendukung penegakkan hukum tanpa pandang bulu, sekalipun yang terlibat adalah pejabat negara.

3. Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja KPK

Pertanyaan: Apakah bapak/ibu/saudara *percaya* atau *tidak percaya* dengan pernyataan bahwa KPK selama ini “tebang pilih” dalam pemberantasan korupsi di Indonesia? n = 800

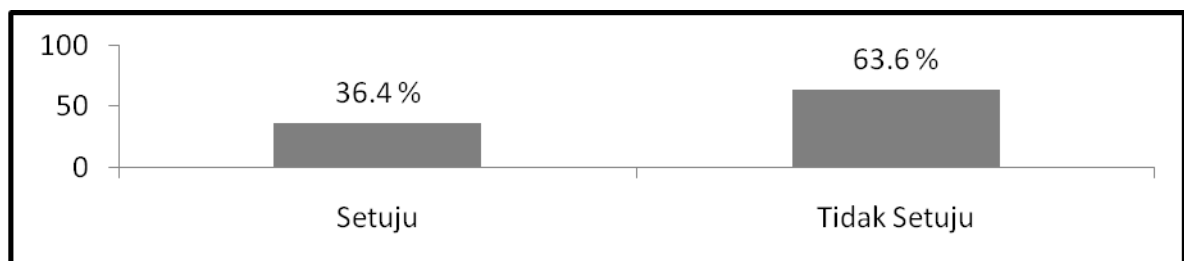


Para pengambil kebijakan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata masih harus membenahi lembaganya sendiri, karena sampai saat ini “image-nya” masih “tebang pilih” dalam memberantas korupsi di Indonesia. Hal ini setidaknya dipersepsikan oleh 69.0 % masyarakat pemilik telepon di 6 kota besar di Jawa, bahwa KPK masih belum berlaku adil

(tebang pilih) dalam pemberantasan korupsi. Hanya sebesar 7.5 % yang mengaku “tidak tahu” dan bingung dalam memberikan penilaian, apakah KPK sudah berlaku adil atau belum dalam pemberantasan korupsi, terlebih lagi saat ini, para petinggi KPK sedang berurusan dengan hukum, disamping, selama ini mereka lebih semangat mencari nafkah keluarga dibanding mencermati kejadian yang terjadi di “atas” (*dibaca: para pejabat public, pusat maupun daerah*). Sebanyak 23.5 % masyarakat “tidak percaya” bahwa KPK tebang pilih dalam pemberantasan korupsi, dengan alasan KPK sudah menjalankan tugasnya (sebagai komisi pemberantasan korupsi) “tanpa pandangbulu”. Hal ini dibuktikan dengan beberapa mantan pejabat negara yang terlibat kasus korupsi,-*di daerah maupun di pusat,-* telah diproses secara hukum bahkan masuk penjara dan uang hasil korupsinya berhasil diselamatkan dan dikembalikan ke kas negara. Akhir-akhir ini, memang banyak pihak (paling tidak masyarakat umum pemilik telepon rumah yang menjadi responden) mempertanyakan integritas dan kredibilitas para petinggi KPK, yang saat ini sedang bermasalah dengan hUkum, terutama menyangkut orang nomor satu (1) di lembaga tersebut.

4. Penilaian Masyarakat Terhadap Statement Para Tokoh Politik Terkait Penahanan Para Petinggi KPK

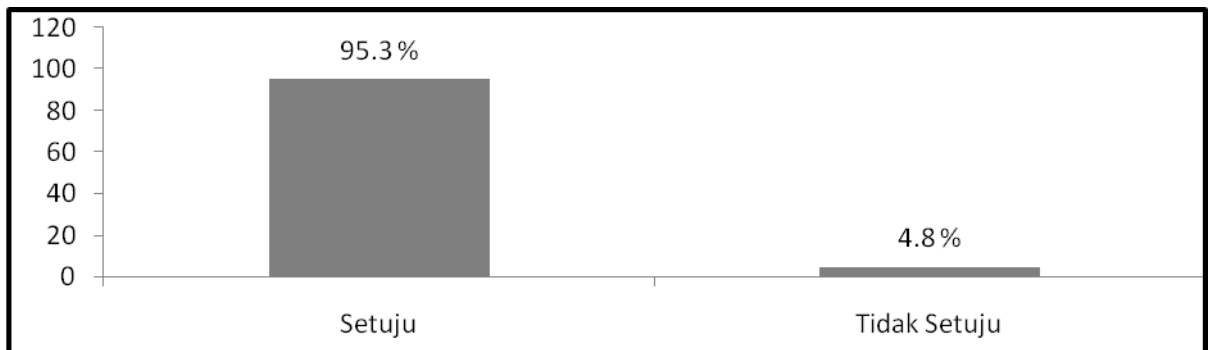
Pertanyaan: Apakah bapak/ibu/saudara *setuju* atau *tidak setuju* dengan pernyataan beberapa tokoh lembaga negara, aktivis LSM maupun pengamat politik yang mengatakan bahwa “petinggi kepolisian harus mengundurkan diri” terkait penahanan Antasari Azhar, dan dugaan suap terhadap 2 orang petinggi KPK?
n = 800



Seperti terlihat pada diagram di atas, lebih dari separuh (63.6 %) masyarakat pemilik telepon diperkotaan “tidak setuju” dengan budaya mundur dari jabatan sebelum terbukti secara hukum yang bersangkutan melakukan pelanggaran yang berakibat fatal,-*baik bagi negara maupun masyarakat*. Masyarakat justru berharap pihak kepolisian menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum di Indonesia, termasuk membongkar “kasus misteri” yang ada di tubuh KPK. Sementara itu sebanyak (36.4 %) masyarakat lainnya “setuju” dengan statement para pengamat, tokoh politik maupun petinggi salah satu lembaga negara yang mengatakan, “petinggi Polri harus mundur dari jabatannya terkait penahanan (Antashari Azhar) dan dugaan suap terhadap 2 orang petinggi KPK lainnya”. Menurut pendapat kelompok masyarakat ini, pernyataan tokoh-tokoh tersebut sebagai kontrol masyarakat (*check and balances*) dalam rangka penegakan hukum. Pro kontra terkait penahanan mantan orang nomor satu di KPK ini disusul dengan dugaan suap kepada 2 orang petinggi KPK lainnya (Chandra Hamzah & Bibit Samad) memang sedang berlangsung ditengah masyarakat. Tetapi yang pasti masyarakat “merasa prihatin dan berkabung” dengan kasus penegakan hukum di Indonesia yang dinodai kasus tersebut (penahanan dan dugaan suap).

5. Harapan Masyarakat Terhadap Lembaga Kepolisian dan KPK

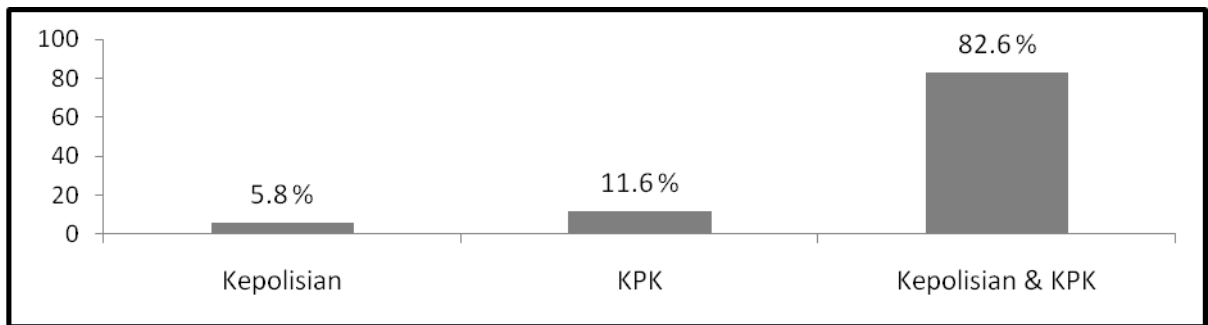
Pertanyaan : Apakah bapak/ibu/saudara *setuju* atau *tidak setuju* dengan usulan bahwa pihak kepolisian dan KPK sebaiknya meningkatkan kerjasama yang lebih erat lagi ke depan dalam rangka penegakan hukum & pemberantasan korupsi di Indonesia? n = 800



Untuk itu, masyarakat berharap, institusi kepolisian dan KPK hendaknya meningkatkan kerjasama yang lebih erat lagi dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia. Harapan ini disampaikan oleh hampir seluruh masyarakat (95.3 %) yang mempunyai kepedulian terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. Mereka menilai, dua lembaga tersebut (Kepolisian dan KPK) sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan negara dalam rangka memberikan perlindungan keamanan kepada masyarakat (sesuai tugas pokok dan fungsi kepolisian), yang dituangkan kedalam motto kepolisian “*Kami Siap Melayani dan Mengayomi Masyarakat*” dan KPK harus terdepan dalam rangka pemberantasan korupsi. Hanya sebagian kecil (4.8 %) yang “tidak setuju” dengan pernyataan bahwa Kepolisian harus meningkatkan kerjasama yang lebih erat lagi kedepan dengan KPK dalam mensinergiskan pemberantasan korupsi di Indonesia. Kelompok masyarakat ini berpendapat bahwa tugas KPK berlebihan dalam penanganan kasus korupsi, padahal ada tahapan-tahapan penyelidikan yang memang sudah bagian tugas pihak kepolisian. Secara implisit mereka mengatakan bahwa penanganan korupsi sebaiknya dilimpahkan kepada pihak kepolisian

6. Pendapat Masyarakat Tentang “Pihak Yang Paling Pantas Menangani Kasus Korupsi”

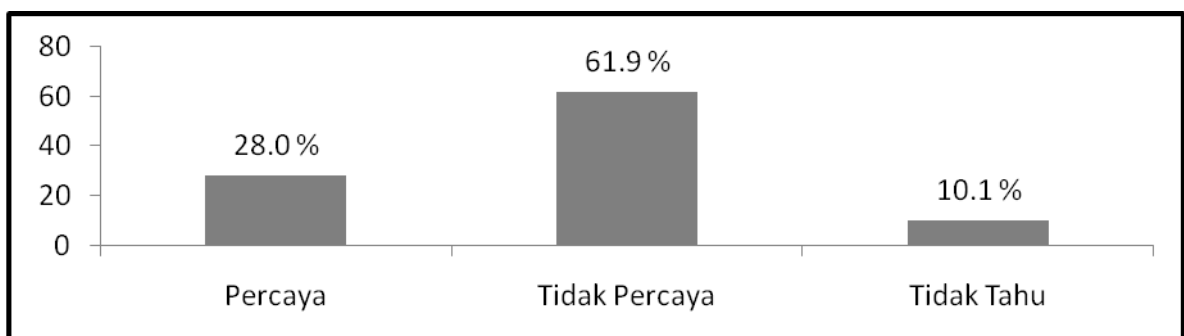
Pertanyaan : Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu tugas kepolisian adalah menindak siapapun yang terlibat tindak pidana termasuk korupsi. Menurut pendapat bapak/ibu/saudara, pihak mana yang paling pantas menangani kasus-kasus korupsi? n = 800



Seperti telah dijelaskan sebelumnya, terlihat pada diagram di atas, sebanyak 5.8 % masyarakat berpendapat bahwa sebaiknya pihak kepolisian-lah yang menangani kasus-kasus korupsi, sebagian lain (11.6 %) berpendapat bahwa penanganan kasus korupsi sudah tepat ditangani oleh pihak KPK, dan sebagian besar (82.6 %) masyarakat berpendapat bahwa kasus-kasus korupsi sebaiknya ditangani pihak kepolisian dan KPK. Untuk itu, sebagian terbesar masyarakat (95.3 %),-seperti terlihat pada diagram sebelumnya,-menyarankan agar kepolisian dan KPK meningkatkan kerjasama yang lebih erat lagi kedepan, karena kasus korupsi sepertinya sulit diberantas tanpa kerjasama dengan penegak hukum lainnya, seperti kepolisian.

7. Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Profesionalisme Pihak Kepolisian Terkait Penahanan Para Petinggi KPK

Pertanyaan : Apakah bapak/ibu/saudara *percaya* atau *tidak percaya* dengan anggapan sebagian pihak (*terkait penahanan Antashari Azhar dan dugaan suap terhadap 2 orang petinggi KPK lainnya*) yang mengatakan bahwa “saat ini kepolisian sedang mengebiri kewenangan / kekuasaan KPK “? n = 800

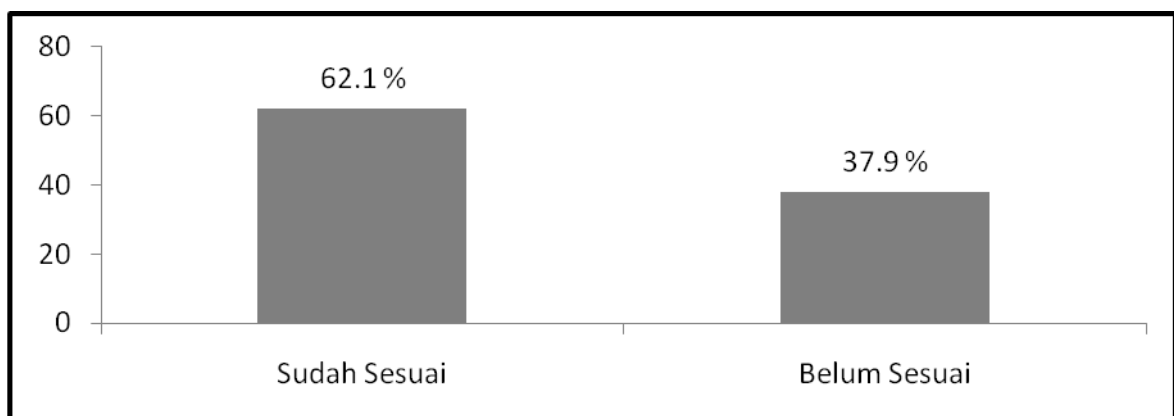


Seperti terlihat pada diagram di atas, lebih dari separuh masyarakat pemilik telepon rumah di 6 ibukota provinsi di Jawa, (61.9 %) “tidak percaya” bahwa institusi kepolisian saat ini sedang mengebiri kewenangan KPK. Mereka yakin, bahwa pihak kepolisian sedang menjalankan tugas pokoknya dalam rangka penegakan hukum, tanpa melihat siapa yang terlibat, dan tindakan ini patut kita dukung dan kita awasi pihak-pihak lain (diluar institusi kepolisian dan KPK) yang punya niat meng-intervensi ranah hukum. Lebih dari seperempat masyarakat (28.0 %) “percaya” bahwa institusi kepolisian sedang mengintervensi kewenangan KPK, karena persoalan “iri saja”. Mereka berpendapat bahwa dalam penanganan kasus korupsi kewenangan kepolisian banyak “di-handle” pihak KPK, saatnya sekarang kepolisian menunjukkan “jati dirinya” sebagai aparat penegak hukum yang dari sisi legalitas formal lebih kuat karena dibentuk dengan dasar undang-undang. Sementara sisanya

(10.1 %) mengaku “tidak tahu” dengan persoalan yang sedang menimpa KPK dan kepolisian, karena bagi sekelompok masyarakat ini, mencari penghidupan bagi keluarga “jauh lebih penting” dibanding menyikapi atau mencermati urusan hukum ataupun politik.

8. Pendapat Masyarakat Terkait Penahanan Para Petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK]

Pertanyaan: Menurut pendapat bapak/ibu/saudara, apakah tindakan kepolisian dengan menahan Antashari Azhar selaku mantan pimpinan KPK dan sangkaan dua petinggi KPK lainnya yang diduga menerima “suap” seperti yang ramai dibicarakan, *sudah sesuai* atau *belum sesuai* dengan aturan hukum kita? n = 800



Berdasarkan data lapangan, seperti terlihat pada diagram di atas, lebih dari separuh masyarakat (62.1 %) berpendapat bahwa langkah pihak kepolisian dengan menahan mantan orang nomor satu di KPK dan dugaan suap kepada 2 orang petinggi KPK lainnya, “sudah sesuai” dengan prosedur hukum. Menurut mereka, “institusi kepolian saat ini tengah menunjukkan yang disebut dengan “penegakkan hukum tanpa pandangbulu” bukan hanya wacana, mengingat, yang diduga terlibat adalah beberapa orang pejabat negara (KPK). Sementara itu, sebanyak 37.9 % masyarakat pemilik telepon rumah di 6 kota besar di Pulau Jawa, berpendapat bahwa langkah kepolisian “belum sesuai” prosedur hukum karena menahan mantan petinggi KPK (Antashari Azhar) dan sangkaan kepada dua orang petinggi KPK lainnya, yang belum jelas bukti keterlibatannya. Alasan ini dibantah oleh sebagian masyarakat yang menilai “sudah sesuai” karena membeberkan seluruh barang bukti di depan umum terkesan “kurang etis” dan cenderung “*character assassination*” seseorang kecuali kepada institusi hukum lainnya (Kejaksaan, Mahkamah Agung). Pro kontra masalah ini juga sedang berlangsung ditengah masyarakat, pihak pengadilan-lah yang akan memutuskan kasus ini.

9. Pendapat Masyarakat Terhadap Statement Pihak Lain, Terkait Konflik Kepolisian Dengan KPK

Pertanyaan: Menyikapi perseteruan antara Pihak Kepolisian dengan KPK, apakah bapak/ibu/saudara *setuju* atau *tidak setuju* dengan pendapat bahwa sebaiknya pihak lain (*diluar institusi penegak hukum lainnya*) jangan memperkeruh suasana? n = 800

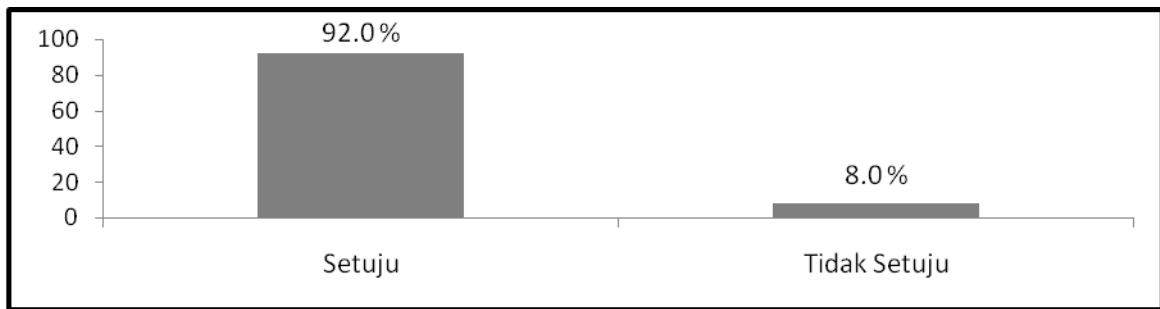
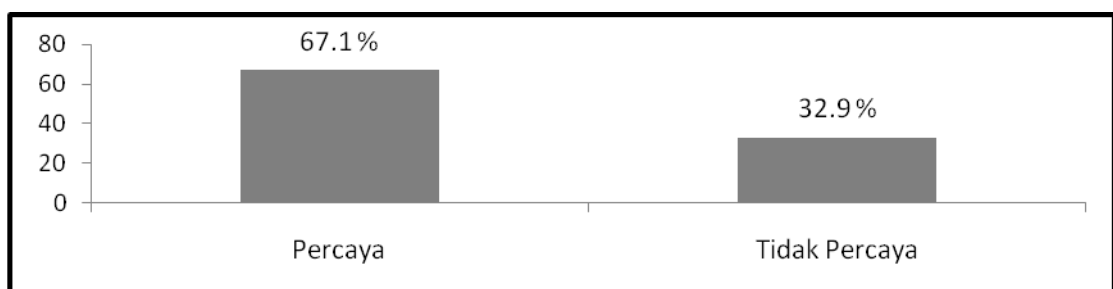


Diagram di atas, menguatkan fakta-fakta lapangan sebelumnya, bahwa lebih dari separuh masyarakat (61.9 %) meyakini pihak kepolisian sudah professional dalam menangani kasus para petinggi KPK (*lihat diagram sebelumnya*), dan masyarakat berpendapat bahwa langkah pihak kepolisian sudah sesuai (62.1 %) prosedur hukum (meski pro kontra). Oleh karena itu, hampir seluruh masyarakat (92.0 %) “setuju” bahwa sebaiknya pihak lain (*diluar institusi kepolisian dan KPK*) jangan memperkeruh suasana dengan munculnya konflik Kepolisian Vs KPK. Hanya sebagian kecil (8.0 %) masyarakat yang “tidak setuju” dengan pendapat ini (*kelompok masyarakat yang membiarkan pihak lain berkomentar dan turut campur dengan kasus Polisi Vs KPK ini*). Mereka beranggapan bahwa komentar, pendapat maupun analisis pihak lain sebagai *socials control* demi transparansi dan akuntabilitas publik dalam penegakan hukum.

10. Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Motif Dibalik Konflik Yang Terjadi Antara Kepolisian Dengan KPK

Pertanyaan : Apakah bapak/ibu/saudara *percaya* atau *tidak percaya* dengan anggapan sebagian pihak bahwa perseteruan antara Kepolisian Vs KPK, ditunggangi pihak lain (*pihak di luar kepolisian dan KPK?* n = 800



Terlihat pada diagram di atas, lebih dari separuh masyarakat (67.1 %) “percaya” bahwa konflik Polisi Vs KPK ada orang lain atau pihak lain yang diuntungkan. Hal ini diperkuat dengan pengakuan masyarakat yang terbukti masih ada pihak yang “tidak setuju” jika pihak lain diam diri tidak menanggapi atau menyoroti perseteruan ini. Selain itu, mereka percaya bahwa konflik atau masalah apapun, pasti ada pihak-pihak lain yang diuntungkan, *baik secara ekonomis maupun politis*. Sementara itu, lebih dari seperempat masyarakat lainnya (32.9 %) beranggapan “tidak percaya” bahwa konflik yang terjadi antara Kepolisian Vs KPK disisipi kepentingan lain. Mereka menilai bahwa pihak kepolisian dan KPK sudah professional, *tidak mungkin ditunggangi pihak lain*, motif konflik, menurut mereka “murni” karena persoalan penegakan hukum, selain ada sedikit perasaan overlap kewenangan (tumpang tindih kewenangan) diantara dua institusi penegak hukum ini.

